

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa energi baru dan terbarukan sebagai sumber daya alam strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Indonesia memiliki sumber daya energi baru dan terbarukan yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, sehingga perlu didorong pengembangan dan pemanfaatannya untuk menjamin dan meningkatkan ketersediaan, ketahanan, dan kemandirian energi nasional secara berkelanjutan;
- c. bahwa energi baru dan terbarukan memiliki peran penting dalam rangka akselerasi transisi sistem energi menuju sistem energi nasional yang berkelanjutan;
- d. bahwa pengembangan dan pemanfaatan sumber daya energi baru dan terbarukan merupakan upaya dan komitmen Indonesia dalam mengatasi dampak perubahan iklim akibat kenaikan suhu bumi sehingga tercipta energi yang bersih dan ramah lingkungan;
- e. bahwa Indonesia menuju negara industri membutuhkan banyak energi yang diperoleh tidak hanya dari energi fosil yang jumlahnya sudah semakin menipis, namun diperlukan juga sumber energi lain yang berasal dari energi baru dan terbarukan;
- f. bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini ada dan mengatur mengenai energi baru dan terbarukan masih tersebar sehingga belum dapat menjadi landasan hukum yang kuat, komprehensif, dan menjamin kepastian hukum;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu membentuk Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat

(5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ENERGI BARU DAN TERBARUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
2. Energi Baru adalah semua jenis Energi yang berasal dari atau dihasilkan dari teknologi baru pengolahan sumber Energi tidak terbarukan dan sumber Energi terbarukan.
3. Energi Terbarukan adalah energi yang berasal atau dihasilkan dari sumber energi terbarukan.
4. Energi Baru dan Terbarukan adalah Energi Baru dan Energi Terbarukan.
5. Sumber Energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan Energi baik dari sumber Energi tidak terbarukan maupun sumber Energi terbarukan, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi.
6. Sumber Energi Baru adalah Sumber Energi yang dapat dihasilkan oleh atau dari teknologi baru baik yang berasal dari Sumber Energi terbarukan maupun Sumber Energi tak terbarukan.
7. Sumber Energi Terbarukan adalah Sumber Energi yang dihasilkan dari Sumber Daya Energi yang dapat diperbaharui dan berkelanjutan.

8. Sumber Energi Tak Terbarukan adalah Sumber Energi yang dihasilkan dari Sumber Daya Energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus.
9. Standar Portofolio Energi Terbarukan adalah standar minimum bagi badan usaha yang membangkitkan listrik dari Sumber Energi Tak Terbarukan untuk membangkitkan listrik dari Sumber Energi Terbarukan.
10. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Bentuk Usaha Tetap adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan oleh pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. efisiensi;

- c. ekonomi berkeadilan;
- d. kelestarian dan berkelanjutan;
- e. ketahanan;
- f. kedaulatan dan kemandirian;
- g. aksesibilitas;
- h. partisipasi; dan
- i. keterpaduan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan bertujuan untuk:

- a. menjamin ketahanan dan kemandirian Energi nasional;
- b. memosisikan Energi Baru dan Terbarukan yang menggantikan secara bertahap energi tak terbarukan sehingga menjadi modal pembangunan berkelanjutan yang mendukung perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;
- c. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional di bidang Energi Baru dan Terbarukan untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- d. menjamin efisiensi dan efektifitas tersedianya Energi Baru dan Terbarukan baik sebagai Sumber Energi maupun sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri;
- e. menjamin akses masyarakat terhadap energi yang dihasilkan oleh sumber Energi Baru dan Terbarukan;
- f. mengembangkan dan memberi nilai tambah atas sumber daya Energi Baru dan Terbarukan;
- g. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha dan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi melalui mekanisme yang terbuka dan transparan; dan
- h. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- i. memberikan kontribusi dalam upaya mitigasi perubahan iklim global.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan meliputi:

- a. penguasaan;
- b. sumber Energi Baru dan Terbarukan;
- c. perizinan dan pengusahaan Energi Baru dan Terbarukan;
- d. penyediaan dan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan;
- e. pengelolaan lingkungan serta keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. penelitian dan pengembangan;
- g. harga Energi Baru dan Terbarukan;
- h. insentif;
- i. dana Energi Baru dan Terbarukan;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. partisipasi masyarakat.

BAB III PENGUASAAN

www.pushep.or.id

Pasal 5

- (1) Sumber Energi Baru dan Sumber Energi Terbarukan yang merupakan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (2) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

BAB IV ENERGI BARU

Bagian Kesatu Sumber Energi Baru

Pasal 6

- (1) Sumber Energi Baru terdiri atas nuklir dan Sumber Energi Baru lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Sumber Energi Baru lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Nuklir

Pasal 7

- (1) Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dimanfaatkan untuk pembangunan pembangkit daya nuklir.
- (2) Pembangkit daya nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pembangkit listrik tenaga nuklir dan pembangkit panas nuklir.
- (3) Pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning pembangkit listrik tenaga nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara khusus.
- (4) Pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning pembangkit panas nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau badan swasta.
- (5) Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan usaha milik negara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Pusat membentuk badan pengawas tenaga nuklir yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) Badan pengawas tenaga nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan nuklir terhadap pembangkit daya nuklir serta kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Pusat dapat menetapkan badan usaha milik negara yang melakukan kegiatan pertambangan bahan galian nuklir.
- (2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (3) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha swasta.
- (4) Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pertambangan yang menghasilkan mineral ikutan radioaktif.
- (5) Badan usaha terkait pertambangan dan mineral batu bara yang menghasilkan mineral ikutan radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (6) Orang perseorangan atau badan usaha yang menemukan mineral ikutan radioaktif wajib mengalihkan pada negara atau badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) serta penemuan mineral ikutan radioaktif oleh orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Setiap kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, kecuali dalam hal tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pembangunan, pengoperasian reaktor nuklir, dan instalasi nuklir lainnya serta dekomisioning reaktor nuklir wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembangunan, pengoperasian reaktor nuklir, dan instalasi nuklir lainnya serta dekomisioning reaktor nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi

Pemerintah Pusat harus memperoleh persetujuan dari Pemerintah Pusat.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Pusat menyediakan tempat penyimpanan lestari limbah radioaktif tingkat tinggi.
- (2) Penentuan tempat penyimpanan lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 12

- (1) Pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan Pembangkit Daya Nuklir yang bertugas merancang dan merumuskan kebijakan strategis nasional pembangkit daya nuklir.
- (2) Majelis Pertimbangan Pembangkit Daya Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah, akademisi, ahli di bidang ketenaganukliran, dan masyarakat dengan komposisi yang proporsional.
- (3) Majelis Pertimbangan Pembangkit Daya Nuklir Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi Dewan Energi Nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Majelis Pertimbangan Pembangkit Daya Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga Perizinan dan Pengusahaan

Paragraf 1 Perizinan

Pasal 13

- (1) Dalam pengusahaan Energi Baru, Badan Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha.

- (2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberikan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Usaha sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk nuklir hanya diberikan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik desa;
 - d. koperasi;
 - e. badan usaha milik swasta; dan
 - f. badan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.

www.pushep.or.id

Pasal 14

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) memberikan kemudahan Perizinan Berusaha dalam pengusahaan Energi Baru.
- (2) Kemudahan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepastian:
 - a. prosedur;
 - b. jangka waktu; dan
 - c. biaya.

Pasal 15

- (1) Badan Usaha yang tidak memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penangguhan kegiatan usaha;

- c. pemberhentian kegiatan usaha; dan/atau
- d. denda.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 serta tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2 Pengusahaan

Pasal 17

Pengusahaan Energi Baru digunakan untuk:

- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. mendukung kegiatan industri;
- c. transportasi; dan/atau
- d. kegiatan lainnya.

www.pushep.or.id

Pasal 18

Kegiatan pengusahaan Energi Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pembangunan fasilitas Energi Baru;
- b. pembangunan fasilitas penunjang Energi Baru;
- c. operasi dan pemeliharaan fasilitas Energi Baru;
- d. pembangunan fasilitas penyimpanan;
- e. pembangunan fasilitas distribusi Energi Baru; dan/atau
- f. pembangunan fasilitas pengolahan limbah Energi Baru.

Pasal 19

- (1) Badan Usaha dapat melaksanakan ekspor dan/atau impor Sumber Energi Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Sumber Energi Baru yang diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pungutan ekspor yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ekspor dan/atau impor Sumber Energi Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Pasal 20

- (1) Badan Usaha yang mengusahakan Energi Baru wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (2) Produk dan potensi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. tenaga kerja Indonesia;
 - b. teknologi dalam negeri;
 - c. bahan-bahan material dalam negeri; dan
 - d. komponen dalam negeri lainnya yang terkait Energi Baru.
- (3) Badan Usaha yang mengusahakan Energi Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Alih ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Teknologi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b harus memenuhi spesifikasi teknis atau standar nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar internasional setelah melalui kliring teknologi dan audit teknologi independen.
- (2) Menteri menetapkan kliring teknologi dan audit teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara kliring teknologi dan audit teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Penyediaan dan Pemanfaatan

Paragraf 1
Penyediaan

Pasal 22

- (1) Penyediaan Energi Baru oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah pedesaan dengan menggunakan Sumber Energi Baru setempat.
- (2) Daerah penghasil Sumber Energi Baru mendapat prioritas untuk memperoleh Energi Baru dari Sumber Energi Baru setempat.
- (3) Untuk penyediaan Sumber Energi Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana.

Pasal 23

Penyediaan Energi Baru dilakukan melalui:

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. badan usaha milik desa;
- d. koperasi;
- e. badan usaha milik swasta; dan
- f. badan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Pusat dapat menugaskan perusahaan listrik milik negara atau badan usaha milik swasta untuk membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari Energi Baru.
- (2) Pemerintah Pusat dapat menugaskan perusahaan minyak dan gas bumi milik negara atau badan usaha milik swasta untuk membeli bahan bakar yang dihasilkan dari Energi Baru.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembelian bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2
Pemanfaatan

Pasal 25

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemanfaatan Energi Baru dengan:

- a. mengoptimalkan dan mengutamakan seluruh potensi Sumber Energi Baru setempat secara berkelanjutan;
- b. mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, lingkungan, dan keberlanjutan; dan
- c. memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil Sumber Energi Baru.

BAB V
ENERGI TERBARUKAN

Bagian Kesatu
Sumber Energi Terbarukan

Pasal 26

Sumber Energi Terbarukan terdiri atas:

- a. panas bumi;
- b. angin;
- c. biomassa;
- d. sinar matahari;
- e. aliran dan terjunan air;
- f. sampah;
- g. limbah produk pertanian;
- h. limbah atau kotoran hewan ternak;
- i. gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut; dan
- j. Sumber Energi Terbarukan lainnya.

Pasal 27

(1) Sumber Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai panas bumi.

- (2) Sumber Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Sumber Energi Terbarukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Perizinan dan Pengusahaan

Paragraf 1
Perizinan

Pasal 28

- (1) Dalam pengusahaan Energi Terbarukan, Badan Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberikan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Usaha sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik desa;
 - d. koperasi;
 - e. badan usaha milik swasta; dan
 - f. badan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) memberikan kemudahan Perizinan Berusaha dalam pengusahaan Energi Terbarukan.

- (2) Kemudahan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepastian:
- a. prosedur;
 - b. jangka waktu; dan
 - c. biaya.

Pasal 30

- (1) Selain Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), perorangan dapat mengusahakan Energi Terbarukan.
- (2) Pengusahaan Energi Terbarukan yang dilakukan oleh perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kapasitas tertentu wajib memiliki Perizinan Berusaha.

Pasal 31

- (1) Badan Usaha yang tidak memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penangguhan kegiatan usaha;
 - c. pemberhentian kegiatan usaha; dan/atau
 - d. denda.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, Perizinan Berusaha perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, serta tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2 Pengusahaan

Pasal 33

- Pengusahaan Energi Terbarukan digunakan untuk:
- a. pembangkitan tenaga listrik;

- b. mendukung kegiatan industri;
- c. transportasi; dan/atau
- d. kegiatan lainnya.

Pasal 34

Kegiatan perusahaan Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dilakukan melalui:

- a. pembangunan industri dan/atau fasilitas Energi Terbarukan;
- b. pembangunan fasilitas penunjang Energi Terbarukan;
- c. operasi dan pemeliharaan fasilitas Energi Terbarukan;
- d. fasilitas penyimpanan;
- e. fasilitas distribusi Energi Terbarukan; dan/atau
- f. fasilitas pengolahan limbah Energi Terbarukan.

Pasal 35

- (1) Badan Usaha dapat melaksanakan ekspor dan/atau impor Sumber Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h.
- (2) Sumber Energi Terbarukan yang diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pungutan ekspor yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ekspor dan/atau impor Sumber Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Pasal 36

- (1) Badan Usaha yang mengusahakan Energi Terbarukan wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (2) Produk dan potensi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. tenaga kerja Indonesia;
 - b. teknologi dalam negeri;
 - c. bahan-bahan material dalam negeri; dan
 - d. komponen dalam negeri lainnya yang terkait Energi Terbarukan.

- (3) Badan Usaha yang mengusahakan Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Alih ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai produk dan potensi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

- (1) Teknologi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b harus memenuhi spesifikasi teknis atau standar nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar internasional setelah melalui kliring teknologi dan audit teknologi independen.
- (2) Menteri menetapkan kliring teknologi dan audit teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara kliring teknologi dan audit teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Penyediaan dan Pemanfaatan

Paragraf 1 Penyediaan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengutamakan penyediaan Energi Terbarukan untuk memenuhi kebutuhan Energi dalam negeri secara berkelanjutan.
- (2) Penyediaan Energi Terbarukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah pedesaan dengan menggunakan Sumber Energi Terbarukan setempat.

- (3) Daerah penghasil Sumber Energi Terbarukan mendapat prioritas untuk memperoleh Energi Terbarukan dari Sumber Energi Terbarukan setempat.
- (4) Untuk penyediaan Sumber Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana.

Pasal 39

Penyediaan Energi Terbarukan dilakukan melalui:

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. badan usaha milik desa;
- d. koperasi;
- e. badan usaha milik swasta;
- f. badan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. perorangan.

www.pushep.or.id

Pasal 40

- (1) Perusahaan listrik milik negara wajib membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari Energi Terbarukan.
- (2) Pemerintah Pusat dapat menugaskan badan usaha milik swasta yang memiliki wilayah usaha ketenagalistrikan untuk membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari Energi Terbarukan.
- (3) Pemerintah Pusat dapat menugaskan perusahaan minyak dan gas bumi milik negara atau badan usaha milik swasta untuk membeli bahan bakar yang dihasilkan dari Energi Terbarukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembelian bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

- (1) Badan Usaha di bidang penyediaan tenaga listrik yang bersumber dari Energi Tak Terbarukan harus memenuhi Standar Portofolio Energi Terbarukan.
- (2) Badan Usaha di bidang penyediaan bahan bakar minyak yang bersumber dari Energi Tak Terbarukan harus mencampur dengan sumber bahan bakar nabati.
- (3) Penggunaan Energi Terbarukan sesuai Standar Portofolio Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan target kebijakan energi nasional.
- (4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan rencana penyediaan Energi Terbarukan secara berkala kepada Menteri.
- (5) Dalam hal Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi Standar Portofolio Energi Terbarukan, Badan Usaha diwajibkan untuk membeli sertifikat Energi Terbarukan.

Pasal 42

- (1) Badan Usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penangguhan kegiatan usaha;
 - c. denda; dan/atau
 - d. pemberhentian kegiatan usaha.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Portofolio Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan sertifikat Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2 Pemanfaatan

Pasal 44

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemanfaatan Energi Terbarukan dengan:

- a. mengoptimalkan dan mengutamakan seluruh potensi Sumber Energi Terbarukan setempat secara berkelanjutan;
- b. mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, dan lingkungan, dan berkelanjutan; dan
- c. memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil Sumber Energi Terbarukan.

BAB VI
PENGELOLAAN LINGKUNGAN SERTA KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 45

- (1) Badan Usaha yang menyelenggarakan Energi Baru dan Terbarukan wajib menjamin standar dan mutu pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan, pencemaran, serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Badan Usaha yang menyelenggarakan Energi Baru dan Terbarukan wajib bertanggungjawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 46

- (1) Badan Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penangguhan kegiatan;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha dan denda.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 47

- (1) Kegiatan penelitian dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan diarahkan untuk mendukung dan menciptakan industri Energi nasional yang mandiri dan berkelanjutan.
- (2) Untuk mendukung dan menciptakan industri Energi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi penelitian dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengembangkan sistem penelitian dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan yang merupakan bagian integral dari sistem nasional penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kewajiban memfasilitasi penelitian dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pendanaan, pengadaan, perbaikan, penambahan sarana dan prasarana, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, penerapan teknologi, serta perizinan untuk penelitian, baik secara mandiri maupun kerja sama dengan pihak ketiga, lintas sektor, dan antarnegara.
- (5) Pelaksanaan pengembangan sistem penelitian dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi kerja nasional

bidang Energi Baru dan Terbarukan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII HARGA ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

Pasal 50

- (1) Harga Energi Baru ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang wajar bagi Badan Usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan harga Energi Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

- (1) Harga Energi Terbarukan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang wajar bagi Badan Usaha.
- (2) Penetapan harga jual listrik yang bersumber dari Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tarif masukan berdasarkan jenis, karakteristik, teknologi, lokasi, dan/atau kapasitas terpasang pembangkit listrik dari Sumber Energi Terbarukan;
 - b. harga indeks pasar bahan bakar nabati; dan/atau
 - c. mekanisme lelang terbalik.
- (3) Harga Energi Terbarukan berupa tarif masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan untuk jangka waktu tertentu.

- (4) Dalam hal harga listrik yang bersumber dari Energi Terbarukan lebih tinggi dari biaya pokok penyediaan pembangkit listrik perusahaan listrik milik negara, Pemerintah Pusat berkewajiban memberikan pengembalian selisih harga Energi Terbarukan dengan biaya pokok penyediaan pembangkit listrik setempat kepada perusahaan listrik milik negara dan/atau Badan Usaha tersebut.
- (5) Penetapan harga jual bahan bakar nabati yang bersumber dari Energi Terbarukan yang dicampur dengan bahan bakar minyak didasarkan pada:
 - a. biaya pokok produksi;
 - b. harga indeks pasar bahan bakar nabati yang dicampurkan ke dalam bahan bakar minyak;
 - c. biaya distribusi dan pengolahan bahan bakar nabati; dan
 - d. subsidi negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan harga Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah

www.pushep.or.id

BAB IX INSENTIF

Pasal 52

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif kepada:
 - a. Badan Usaha yang mengusahakan Energi Baru dan Terbarukan; dan
 - b. Badan Usaha di bidang tenaga listrik yang menggunakan Energi tak terbarukan yang memenuhi Standar Portofolio Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa insentif fiskal dan/atau insentif nonfiskal untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X DANA ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengusahakan dana Energi Baru dan Terbarukan untuk mencapai target kebijakan energi nasional.
- (2) Dana Energi Baru dan Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. pungutan ekspor Energi Tak Terbarukan;
 - d. dana perdagangan karbon;
 - e. dana sertifikat Energi Terbarukan; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Energi Baru dan Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pembiayaan infrastruktur Energi Baru dan Terbarukan;
 - b. pembiayaan insentif Energi Baru dan Terbarukan;
 - c. kompensasi Badan Usaha yang mengembangkan Energi Baru dan Terbarukan;
 - d. penelitian dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan; dan
 - e. peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia bidang Energi Baru dan Terbarukan.
 - f. subsidi harga energi terbarukan yang harganya belum dapat bersaing dengan energi tak terbarukan.
- (4) Dana Energi Baru dan Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana Energi Baru dan Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan.

Pasal 55

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 antara lain:
 - a. perizinan;
 - b. pengusaha;
 - c. pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. pengolahan data dan informasi Energi Baru dan Terbarukan; dan
 - e. pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 56

- (1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan berbentuk:
 - a. pemberian masukan dalam penentuan arah kebijakan Energi Baru dan Terbarukan;
 - b. pengajuan keberatan terhadap pelaksanaan peraturan atau kebijakan Energi Baru dan Terbarukan;
 - c. inisiatif perorangan atau kerja sama dalam penyediaan, penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan; dan/atau

- d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peraturan atau kebijakan Energi Baru dan Terbarukan.
- (3) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan masyarakat berhak untuk:
- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengusaha Energi Baru dan Terbarukan melalui Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - b. memperoleh manfaat atas kegiatan pengusaha Energi Baru dan Terbarukan; dan
 - c. memperoleh kesempatan kerja dari kegiatan penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

www.pushep.or.id

Pasal 57

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Energi Baru dan Terbarukan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831), dicabut dan dinyatakan tidak

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

I. UMUM

Sumber Daya Energi sebagai kekayaan alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan sumber daya yang strategis dan harus dimanfaatkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pemanfaatan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus menjamin ketersediaan energi untuk generasi yang akan datang. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya energi harus dikelola dengan baik dan secara berkelanjutan. Sumber Energi Baru dan Terbarukan yang merupakan sumber energi juga harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Saat ini, sumber Energi Baru dan Terbarukan yang tersedia secara melimpah di Indonesia belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, sehingga perlu didorong pengembangan dan pemanfaatannya untuk menjamin dan meningkatkan ketersediaan, ketahanan, dan kemandirian energi nasional secara berkelanjutan. Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan perlu ditingkatkan secara signifikan dalam rangka mengantisipasi terjadinya krisis energi, sebagai akibat dari menipisnya cadangan Energi Tak Terbarukan Indonesia.

Pengaturan Energi Baru dan Terbarukan saat ini sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan namun peraturan perundang-undangan yang saat ini ada dan mengatur tentang Energi Baru dan Terbarukan masih tersebar dalam beberapa peraturan sehingga implikasinya, kerangka hukum tersebut sering mengalami perubahan dan belum dapat menjadi landasan hukum yang kuat, komprehensif, dan menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, pengaturan secara khusus

dan komprehensif dalam Undang-Undang secara tersendiri dibutuhkan dan sekaligus menjadi acuan terhadap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Selain itu, Ratifikasi Perjanjian Paris oleh Indonesia untuk menjaga kenaikan temperatur dunia tidak lebih dari 2°C ikut mendorong Indonesia untuk lebih banyak memanfaatkan sumber daya Energi Baru dan Terbarukan.

Penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan dalam Undang-Undang ini didasarkan pada asas kemanfaatan, efisiensi, ekonomi berkeadilan, kelestarian dan keberlanjutan, ketahanan, kedaulatan dan kemandirian, aksesibilitas, partisipatif, dan keterpaduan. Selanjutnya tujuan dari penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan yaitu untuk menjamin ketahanan dan kemandirian Energi nasional, memosisikan Energi Baru dan Terbarukan yang menggantikan secara bertahap energi tak terbarukan sehingga menjadi modal pembangunan berkelanjutan yang mendukung perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia, mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional di bidang Energi Baru dan Terbarukan untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional, menjamin efisiensi dan efektifitas tersedianya Energi Baru dan Terbarukan baik sebagai Sumber Energi maupun sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri, menjamin akses masyarakat terhadap sumber Energi Baru dan Terbarukan, mengembangkan dan memberi nilai tambah atas sumber daya Energi Baru dan Terbarukan, menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha dan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi melalui mekanisme yang terbuka dan transparan, dan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Secara umum Undang-Undang ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis yaitu asas dan tujuan, penguasaan, Sumber Energi Baru dan Sumber Energi Terbarukan, perizinan dan pengusahaan Energi Baru dan Terbarukan, penyediaan, pemanfaatan, pengelolaan

lingkungan serta keselamatan dan kesehatan kerja, penelitian dan pengembangan, harga Energi Baru dan Terbarukan, insentif, dana Energi Terbarukan, pembinaan dan pengawasan, sanksi, dan partisipasi masyarakat.

Dalam pengaturan penguasaan, Energi Baru dan Terbarukan sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Penguasaan Energi Baru dan Terbarukan oleh negara. Penguasaan dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

Dalam pengusahaan Energi Baru dan Terbarukan terdapat kewajiban bagi Badan Usaha memiliki Perizinan Berusaha yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai peruntukkan dari pengusahaan Energi Baru dan Terbarukan yaitu untuk pembangkitan tenaga listrik, mendukung kegiatan industri, transportasi, dan/atau kegiatan lainnya.

Dalam penyediaan Energi Baru dan Terbarukan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengutamakan penyediaan Energi Baru dan Terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dan wajib menjaga Sumber Energi Baru dan Sumber Energi Terbarukan secara berkelanjutan. Dalam pengaturan pemanfaatan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dengan mengoptimalkan dan mengutamakan seluruh potensi Sumber Energi Baru dan Terbarukan setempat secara berkelanjutan, mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, konservasi, dan lingkungan, serta memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil Sumber Energi Baru dan Terbarukan.

Dalam Undang-Undang ini terdapat pengaturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan dan kesehatan kerja yaitu kewajiban Badan Usaha yang menyelenggarakan Energi Baru dan Terbarukan untuk menjamin standar dan mutu pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan dan kesehatan kerja. Selain pengaturan di atas

terdapat juga pengaturan mengenai harga Energi Baru dan Terbarukan yang ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang wajar bagi Badan Usaha. Pengaturan lainnya yaitu mengenai insentif kepada Badan Usaha yang mengusahakan Energi Baru dan Terbarukan dan Badan Usaha di bidang tenaga listrik yang menggunakan Energi tak terbarukan yang memenuhi Standar Portofolio Energi Terbarukan. Insentif yang diberikan berupa insentif fiskal dan/atau insentif nonfiskal untuk jangka waktu tertentu.

Pengaturan lainnya dalam Undang-Undang yaitu dana Energi Baru dan Terbarukan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, pungutan ekspor Energi Tak Terbarukan, dana perdagangan karbon, dana sertifikat Energi Terbarukan, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan mencakup tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan. Selain itu terdapat pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan serta terdapat pula sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Usaha dalam penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan memenuhi kebutuhan masyarakat serta dapat meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan mencapai harga yang ekonomis dan terjangkau.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas ekonomi berkeadilan” adalah penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan yang mencerminkan biaya produksi energi, termasuk biaya lingkungan dan biaya konservasi serta keuntungan yang dikaji berdasarkan kemampuan daya beli masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam hal penyediaan dan pemanfaatan energi untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketahanan” adalah penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan yang harus mencapai kemampuan nasional dalam pengelolaan energi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan dan kemandirian” adalah penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan mengutamakan pemanfaatan sumber energi dalam negeri untuk dimanfaatkan sendiri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas aksesibilitas” adalah penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan mencapai pemerataan akses terhadap energi yang dapat menjangkau semua wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk keterwakilan gender dalam mencapai ketahanan energi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan mencapai

pengelolaan energi secara terpadu antarsektor serta mengutamakan kemampuan nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Sumber Energi Baru lainnya” adalah sumber energi yang menurut perkembangan teknologi dapat dikategorikan sebagai Energi Baru.

Sumber Energi Baru lainnya antara lain hidrogen, gas metana batu bara (*coal bed methane*), batu bara tercairkan (*liquefied coal*), dan batu bara tergaskan (*gasified coal*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Keamanan meliputi *safeguard* dan proteksi fisik. *Safeguard* merupakan upaya yang ditujukan untuk memastikan bahwa tujuan pemanfaatan bahan nuklir hanya untuk maksud damai. Proteksi fisik merupakan upaya yang ditujukan untuk mendeteksi dan mencegah pemindahan bahan nuklir secara tidak sah dan mencegah sabotase instalasi nuklir.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Majelis Pertimbangan Pembangkit Daya Nuklir memiliki tujuan memastikan pembangunan nuklir nasional berkelanjutan dengan Sistem Keselamatan Nuklir Nasional yang Kuat – Kekuatan Kelembagaan Berlapis (*Ensuring Robust National Nuclear Safety Systems – Institutional Strength In Depth*).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah masyarakat yang memiliki keahlian dan kemampuan terkait di bidang ketenaganukliran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Keamanan meliputi *safeguard* dan proteksi fisik. *Safeguard* merupakan upaya yang ditujukan untuk memastikan bahwa tujuan pemanfaatan bahan nuklir hanya untuk maksud damai. Proteksi fisik merupakan upaya yang ditujukan untuk

mendeteksi dan mencegah pemindahan bahan nuklir secara tidak sah dan mencegah sabotase instalasi nuklir.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan lainnya” antara lain kegiatan dalam bidang kesehatan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kliring teknologi” adalah proses penyaringan kelayakan atau suatu teknologi melalui kegiatan pengkajian untuk menilai atau mengetahui dampak dari penerapannya pada suatu kondisi tertentu.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan “Sumber Energi Terbarukan lainnya”
adalah sumber energi yang menurut perkembangan teknologi
dapat dikategorikan sebagai Energi Terbarukan.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan lainnya” antara lain kegiatan dalam bidang kesehatan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemenuhan kebutuhan rumah tangga..

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kliring teknologi” adalah proses penyaringan kelayakan atau suatu teknologi melalui kegiatan pengkajian untuk menilai atau mengetahui dampak dari penerapannya pada suatu kondisi tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bahan bakar nabati” adalah semua bahan bakar yang berasal dari minyak nabati dapat berupa *biodiesel*, *bioetanol*, *bio-oil* (minyak nabati murni), *butanol*, dan *etanol*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” antara lain perguruan tinggi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, badan usaha swasta, perorangan, masyarakat, kelompok masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang wajar bagi Badan Usaha” adalah nilai keekonomian dari pembangkitan Energi Baru dan Energi Terbarukan yang mempertimbangkan paling sedikit:

- a. biaya investasi;
- b. tingkat efisiensi produksi;
- c. manfaat lingkungan;
- d. manfaat sosial;
- e. manfaat kesehatan;
- f. manfaat penurunan emisi gas rumah kaca;
- g. keuntungan yang memadai; dan
- h. kemampuan daya beli masyarakat.

Yang dimaksud dengan “mempertimbangkan tingkat pengembalian yang wajar” adalah mempertimbangkan tingkat pengembalian (*internal rate of return*) dari investasi oleh Badan Usaha paling sedikit 4% (empat persen) di atas tingkat bunga investasi komersial yang berlaku.

Ayat (2)

Huruf a

Yang di maksud dengan “tarif masukan“ (*Feed-in tariff*) adalah insentif yang diberikan oleh pemerintah berupa harga pembelian listrik oleh badan usaha milik negara ketenagalistrikan dari Badan Usaha pembangkit tenaga listrik Energi Terbarukan yang ditetapkan untuk mencapai keekonomian.

Yang dimaksud dengan “karakteristik pembangkit listrik” adalah *intermittent*, *base loader*, dan *peaker* atau *load follower*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang di maksud dengan “mekanisme lelang terbalik” (*reverse auction*) adalah mekanisme untuk mendapatkan harga lebih efisien untuk pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit tenaga listrik tenaga angin dengan kapasitas terpasang di atas 10 MW (sepuluh megawatt) kondisi awal untuk dapat melaksanakan pelelangan disediakan oleh Pemerintah Pusat, diantaranya: lahan untuk pembangunan Energi Baru dan Terbarukan, jaringan listrik, perizinan, dan insentif fiskal.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jangka waktu tertentu” adalah jangka waktu dimana biaya pokok produksi listrik mendekati dari titik impas (*break event point*).

Ayat (4)

Kompensasi kepada perusahaan listrik milik negara dan/atau Badan Usaha yang ditugaskan untuk menyediakan listrik di suatu wilayah apabila harga listrik yang bersumber dari Energi Terbarukan lebih tinggi dari biaya pokok penyediaan setempat dari perusahaan listrik milik negara dan/atau Badan Usaha di daerah diberikan untuk menghindarkan kerugian dari perusahaan listrik milik negara

dan/atau Badan Usaha tersebut. Besaran kompensasi merupakan selisih antara harga Energi Terbarukan dan biaya pokok penyediaan dari perusahaan listrik negara dan/atau Badan Usaha yang ditugaskan untuk menyediakan listrik di wilayah tersebut. Pemberian kompensasi berlaku dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Ayat (1) www.pushep.or.id
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” antara lain perguruan tinggi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, badan usaha swasta, perorangan, masyarakat, kelompok masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

www.pushep.or.id